

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA KAPUAS

Nina Yasari¹, Fakhshianor², Sitna Hajar Malawat³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NPM17120041

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NIDN 1120106301

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NIDN1113059101

Email : Ninayasari10@gmail.com

ABSTRAK

NINA YASARI, NPM. 17120041 “Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Kebersihan Dan Keindahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kapuas”. Bimbingan Bapak Fakhshianor sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Sitna Hajar Malawat sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanan dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu interview (wawancara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan sampah dan pertamanan sudah berjalan dengan baik dilihat dari empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Serta indicator lain yaitu adanya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan, Sampah

ABSTRACT

Nina Yasari, Npm. 17.12.0041. "Waste Management Policy in Achieving Cleanliness and Beauty at the Kapuas City Environmental Service". Main Advisor Fakhshianor and Co. Advisor Sitna Hajar Malawat.

The purpose of this study was to determine the implementation of government policies at the Department of Environment, Settlement and Environment of Kapuas Regency Number 10 of 2011 concerning waste management and landscaping and to determine community participation. The type of research used in this research is descriptive using a qualitative approach. The data collection technique is interview (interview). Meanwhile, the focus of this research is the implementation of the policies of the Kapuas Regency Government. which.

The results of the study indicate that the implementation of the policy of regional regulation No. 10 of 2011. Regarding waste management and landscaping has been going well, seen from four indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. As well as another indicator, namely the existence of community participation.

Keywords: Policy, Management, Waste

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah menjadi pokok permasalahan yang penting untuk diperhatikan karena sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya bertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat yang berujung dengan meningkatnya jumlah sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai macam jenis kebutuhan bahan pokok dan hasil teknologi serta usaha-usaha dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat

memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilkan.

Seperti di Daerah Kota Kabupaten Kapuas, masyarakatnya masih banyak yang tidak membuang sampah pada tempat pembuangan, di beberapa pemukiman masih terdapat temuan ketiadaan bak sampah yang seharusnya difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Ditambah kurangnya kesadaran dan pemahaman warga terhadap bahaya sampah menjadi faktor penting yang semestinya ditanggapi secara serius oleh pemerintah daerah. Karena

jika dibiarkan berlarut-larut, sampah ini tentunya akan menjadi dampak buruk bagi warga itu sendiri selain mempengaruhi estetika lingkungan sekitar. Dapat dilihat sampah-sampah yang menumpuk tanpa dikelola dengan baik, dapat menjadi penyebab terjadinya banjir karena menyumbat saluran air. Selain itu sampah-sampah jenis tertentu berbahan plastik juga memerlukan waktu beratus-ratus tahun agar dapat terurai dalam tanah yang dampaknya secara tidak langsung memengaruhi ekosistem dalam kehidupan manusia pada umumnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanan. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebersihan untuk menciptakan Kabupaten Kapuas yang bersih, unggul dan serasi, perlu ada kepastian dan kejelasan peraturan pembagian kewenangan antara Daerah dengan paran serta masyarakat dan dunia usaha, penyesuaian dengan keadaan.

Persoalan sampah telah menjadi permasalahan yang serius sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien. Hal ini, juga tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia.

Namun, upaya tersebut kerap mengalami kendala serta sebagian warga yang tidak disiplin dengan membuang sampah sekenanya, kemudian dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan. Pengelolaan persampahan suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Berkaitan dengan pemikiran tersebut di atas, pentingnya penelitian ini dilakukan, dengan mengambil judul ***“Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Kebersihan Dan Keindahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kapuas”***

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi permasalahan atau persoalan. Anderson dalam Budi Winarno (2012:21). Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak

dilakukan. Thomas R. Dyedal dalam Budi Winarno (2012:20). Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.” Carl Friedric dalam budi winarno (2012:20)

Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara mengharuskan adanya suatu Implementasi Kebijakan. Dari hal tersebut terdapat beberapa pendapat mengenai Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Gordon dalam Pasolong dalam Deddy Mulyadi (2015:24) implementasi adalah, ”berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Metter dan Horn dalam Agustino (2012:139), ”Implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Konsep Partisipasi Masyarakat

H.A.R. Tilaar, (2009: 287), mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Sedangkan menurut Huneryear & Heoman dalam Siti Irene Astuti D (2009: 32), ”partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.” Ahli lain juga berpendapat bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D (2009: 31-32) ”Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, ”Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi

atau sampel tertentu. (Sugiyono, 2016:8). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu suatu metode dalam peneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Jenis penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Kebersihan Dan Keindahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kapuas berdasarkan indicator Komunikasi, Sumber Daya dan Disposisi :

A. Indikator Komunikasi

Dalam proses pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas telah dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yaitu dari bidang tugas sub bagian bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup misalnya, dalam upaya penyampaian mengenai pengelolaan sampah, bagaimana menanggulangnya dan apa manfaatnya sampah di kehidupan kita, maka oleh sebab itu peran dinas dalam hal ini sangatlah penting, dalam proses kegiatan. Pelaksanaan implementasi kebijakan di Kabupaten Kapuas telah di sosialisasikan sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini 2021, berbagai perubahan telah dilakukan demi tercapainya Kabupaten Kapuas yang bersih. Seperti tahun 2018 dimana Kabupaten Kapuas meraih gelar Adipura, dalam hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas setiap tahunnya selalu ada peningkatan terutama dalam bidang kebersihan pengelolaan sampah.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam proses sosialisasi diantaranya melalui media-media seperti media elektronik dan media cetak.

1. media elektronik

proses penyampaian sosialisasi menggunakan media radio biasanya dilakukan setiap pagi dan sore hari. Isi dari media radio biasanya pernyataan larangan larangan dan himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang larangan membuang sampah sembarangan diradio

2. Media Cetak

Tidak hanya media elektronik saja tetapi dimedia cetakpun juga ada, seperti pembagian brosur-brosur kepada masyarakat yang isinya himbauan kepada masyarakat tentang jangan membuang sampah sembarangan, dan bagaimana sampah yang awalnya tidak memiliki nilai menjadi barang yang bernilai dengan pengelolaan sampah itu sendiri, pemasangan poster sepanduk juga ada biasanya himbawan tersebut dipasang di tiang dekat TPS (Tempat Pembuangan

Sampah)

Penulis juga meneliti pesoses penyampaian terkait kebijakan pengelolaan sampah telah disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisai-sosialisasi ketiap tiap-tiap wilayah baik itu ke kecamatan, kelurahan, pedesaan dan sekolah- sekolah. Proses sosialisasi di Kabupaten Kapuas telah dilakukan sejak tahun 2008 namun belum bisa berjalan lancar, berbagai kendala dalam segi biaya operasional, kekurangan jumlah pegawai menjadi faktor utama. Tetapi daerah tidak tinggal diam yang dibuktikan dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan dan evaluasi hingga pada akhirnya setiap tahun selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik hingga saat ini.

Sosialisasi ke lembaga-lembag baru bisa berjalan lancar sejak tahun 2009 melalui kelurahan-kelurahan, pedesaan hingga ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini peneliti juga mengemukakan dari beberapa orang dalam proses wawancara kepada pihak Dinas tentang sosialisasi, diantaranya beberapa pendapat menyampaikan proses sosialisasi itu telah dilakukan, dan menurut ketentuan peraturan daerah dalam setahun dua kali sesuai jadwal program pemerintah, namun pada akhirnya dalam proses kegiatan setahun mereka bisa lebih dari sepuluh kali sosialisasi, dikarenakan tidak hanya dari Dinas sendiri yang mengadakan namun dari beberapa kelurahan, desa-desa, komunitas-komunitas bahkan dari RT maupun RW ada yang meminta dinas untuk sosialisasi.

Untuk saat ini dari Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam proses sosialisasi lebih berfokus kepada perkotaan, dikarenakan perkotaan menjadi sudut pandang penilaian, terutama pada sektor pasar perlu adanya penanganan khusus dalam pengelolaan sampah dan menjadi poin penilaian baik buruknya suatu wilayah. Nampaknya suatu sampah diperkotaan apabila tidak dikelola maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif pencemaran lingkungan, bahaya yang ditimbulkan dan mengurangi nilai keindahan di kota Kapuas Kabupaten Kapuas. Selain di pasar, sosialisasi juga sering diterapkandi sekolah-sekolah khususnya beberapa sekolah yang masuk dalam kategori, SMA 1 adalah sekolah yang dijadikan percontohan sekolah bersih terhindar dari sampah sekolah bersih. Di Kabupaten Kapuas itu sendiri ada tiga sekolah yang masuk dalam adiwinata SMA 2 Kapuas, SMKN 1 Kapuas, dan SDN. Pihak berwenang lebih senang melakukan sosialisai ke sekolah-sekolah karena menurut mereka penyampaian sosialisai kepada anak-anak itu lebih mudah ketimbang ke orang tua, anak-anak lebih peka dan bisa diarahkan.

2. Sumber daya

Dilihat dari sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dari segi yang terlibat terutama dibidang

a. Bidang tata kota dan kebersihan

Penulis menilai bidang inilah yang menjadi peran penting dalam penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas. Dikarenakan mereka mempunyai tugas bagaimana suatu wilayah bersih. Dalam proses kegiatannya bidang tata kota kapuas melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan peraturan bupati kapuas nomor 35 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi. Namun ada beberapa kendala seperti di penggolongan dana yang belum memadai sehingga berbagai jenis tempat yang digunakan sebagai TPS sebagian masih belum standar seperti masih banyak TPS yang tempatnya masih bergabung antara barang Organik dan Non organik .

b. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Bidang inilah yang mempengaruhi terutama didalam masyarakat karena memiliki tugas mempengaruhi para lembaga masyarakat untuk menjalankan proses yang berkaitan dengan membuang sampah pada tempatnya, pengelolaan sampah, sampah yang awalnya tidak ada manfaatnya menjadi barang yang bermanfaat. Dalam proses pelaksanaan kebijakannya sudah berjalan baik namun yang menjadi kendala didalam dana Pemerintah dalam proses kegiatan, dan penambahan personil untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

c. Bidang tata lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas menata lingkungan yang awalnya tidak sesuai dan berdampak negatif menjadi tatanan yang bagus dan rapi seperti letak pembuangan sampah yang terdekat. Dalam proses kegiatannya pelaksanaannya sudah berjalan lancar tidak ada kendala.

Tidak hanya lembaga Dinas yang terlibat namun dari pihak kelurahan, perdesaan juga terlibat dalam upaya penanganan sampah, seperti dari dinas menyampaikan kepada kelurahan atau pedesaan dan kelurahan menyampaikan kembali ke pada para RT dan RW nya, bahkan dari dinas bisa langsung ke RT atau RW apabila ada penanganan khusus di daerah tersebut

3. Disposisi

Dalam pelaksanaan kegiatan para lembaga Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas mempunyai komitmen menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan mempunyai target untuk tercapainya suatu lingkungan yang kondusif, bersih terhindar dari sampah. Dari segi evaluasi penulis mengemukakan bahwa evaluasi selalu dilakukan oleh dinas berupa penilaian kinerja pegawai baik pegawai dinas maupun pekerja lapangan, agar menjadi perbaikan dimana proses kegiatan yang terkendala dan diperbaiki untuk menciptakan Kabupaten Kapuas yang lebih baik lagi. Untuk proses kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan selama ini para

pegawai sudah tepat waktu namun biasanya para pegawai tidak selamanya di kantor mereka biasanya ke instansi lain untuk sosialisai berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sub bagian. Dalam proses kegiatan juga ada sanksi-sanksi yang tegas berupa surat peringatan dan penurunan pangkat dan golongan serta pemecatan apabila pegawai tidak melaksanakan tugas dan melakukan penyelewengan dana anggaran dan pencemaran nama lembaga dinas.

Dari segi kesadaran para pegawai sudah melaksanakan tugas sesuai bagiannya masing-masing, penulis meneliti para pegawai sudah langsung bekerja dan paham apa saja yang harus dilakukan tidak ada suruhan terus menerus dari atasan. Ini menunjukkan bahwa para pegawai sudah mengerti dan paham dengan tugas dan tanggung jawab bagian masing-masing. Para pegawai di lapangan pun juga mempunyai tugas sesuai bagiannya masing-masing. Untuk bagian bersih cuma satu kali saja dalam sehari terkecuali ada penugasan dari pimpinan dan untuk bagian pengangkut satu kali bagi pengangkut menggunakan gerobak dan bagian pekerja mengunkan dum truk melaksanakan dua kali dalam sehari.

Dari segi bekerja biasanya para pekerja melaksanakan kegiatan di waktu pagi sekitar pukul 06.00 Wib untuk bagian bersih-bersih sampai dengan pukul 10.00 Wib terkadang juga mereka ditugaskan apabila ada acara di lingkungan sekitar Kabupaten Kapuas dan untuk bagian pengangkut sampah mereka mulai beraktivitas mulai pukul 08.00 Wib sampai selesai.

Ketika di lapangan secara rutin sebelum tengah hari para pekerja sudah selesai melaksanakan kegiatannya bersih-bersih berupa bagian sapu jalan, potong rumput, bagian kebersihan parit. Penulis meneliti disetiap lingkungan. perkotaan baik itu pasar, lingkungan kedinasan, perkantoran dan komplek-komplek sekitar sudah bersih terhindar dari sampah.

Faktor penghambat

Dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa hambatan diantaranya para pekerja di lapangan yaitu masyarakat yang seharusnya membuang sampah di TPS diwajibkan pukul 18.00 Wib sampai pukul 06.00 Wib pagi hari sesuai peraturan daerah Kapuas, dalam kenyataannya masih banyak yang membuang sampah di siang hari di luar peraturan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kurang berperan serta dalam program pemerintah yang mana juga dibuktikan dengan banyaknya sampah yang berserakan dilingkungan sekitar tidak dimasukkan ke tempat yang telah disediakan, pembuangan sampah di selokan yang menyebabkan penumpukan jika dibiarkan akan menyebabkan penyumbatan pada selokan, pembuangan sampah tidak dibungkus dengan plastik juga menyulitkan para pekerja karena harus mengumpulkan, menumpuk barulah dimasukkan ke dalam dump truk, tidak dibedakan antara sampah organik dan non organik

sehingga para pekerja memilah-milah dulu barulah dimasukkan kedalam dum truk inilah penyebab terkendalanya proses kegiatan menyebabkan pekerjaan tidak sesuai pelaksanaan dan ketidaksesuaian waktu.

Faktor Pendukung

Dalam proses kegiatan pelaksanaan terdapat hal yang memudahkan para pekerja diantaranya disediakan alat transportasi gerobak pengangkut sampah di setiap kelurahan dan desa-desa sehingga memudahkan pengangkutan sampah yang berada di pelosok-pelosok.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, studi di Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah undang-undang nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang terdiri penyampaian komunikasi, kejelasan, dan konsistensi dalam implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sampah dan pertamanan di Kabupaten Kapuas merupakan cara agar masyarakat dapat menjalankan dan memahami kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas kepada masyarakat, agar tidak terjadi salah paham dalam menerima informasi. Oleh karena itu implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan sampah dan pertamanan sudah berjalan dengan baik namun belum efektif.
2. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanan di Kabupaten Kapuas belum maksimal, dikarenakan terhambat dengan anggaran sehingga terlambatnya pembuatan bak sampah di lingkungan Kabupaten Kapuas.
3. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan pertamanan di Kabupaten Kapuas sudah bisa dikatakan sudah baik dikarenakan para pegawai Dinas sudah melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing namun
4. Struktur Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas sudah berjalan dengan baik

sesuai dengan SOP(Standar Oprasional Prosudure).

REFERENSI

- Ariesta Erlangga, 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Daur Ulang sampah*. Semarang: Jurnal Tehnik Perencanaan dan Kota. Vol 3, No 3. 382.391.
- Edi Suharto, 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Fachmi Dina Diba, 2014. *Partisipasi Dalam Menanggulangi sampah dan Kebersihan Lingkungan*. Samarinda: Jurnal Administrasi Vol 2, No 1.946.957
- Mulyadi deddy, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Winarno Budi, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.